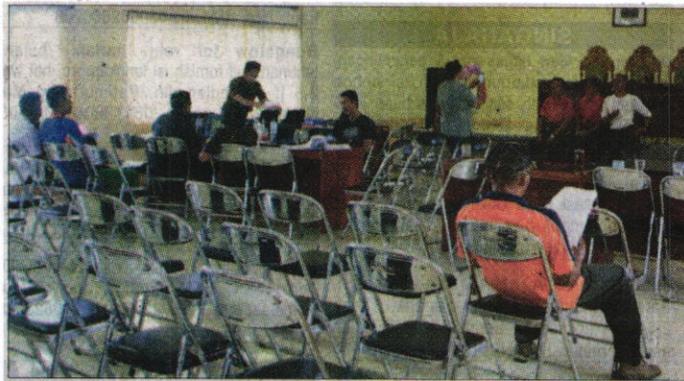




## Radar Bali

# 11 Staf DKP Tabanan Diperiksa Selama 6 Jam



KETUT SUGINA/ BALI EXPRESS

**USUT PEMERASAN CPNS:**Kejari Tabanan kemarin memeriksa 11 staf DPK Tabanan. Selama 6 jam, mereka mendapat 35 pertanyaan.

**TABANAN** - Guna melengkapi berkas pemeriksaan terkait kasus dugaan pemerasan calon pegawai negeri sipil (CPNS), Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan kembali memeriksa staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan. Kali ini yang diperiksa sebanyak 11 orang yang merupakan para staf di DKP. Ini merupakan pemeriksaan tambahan dan terakhir bagi para staf DKP setelah sebelumnya diperiksa berkali-kali bolak balik ke Kejari Tabanan. Mereka diperiksa secara bergiliran di Aula Kejari Tabanan di lantai dua, Kamis kemarin (16/4).

Dari pantauan koran ini, para saksi yang merupakan para staf DKP itu semuanya dimasukkan ke Aula Kajari Tabanan. Mereka

kemudian secara bergiliran diperiksa oleh sedikitnya lima orang jaksa penyidik di dalam aula tersebut. Dari raut mukanya para saksi itu ada yang tampak

tegang dan serius, walau beberapa yang lainnya justru terlihat santai.

Bahkan beberapa di antara mereka sempat berfoto selfi ria dengan rekan-rekannya. "Iya lihat

sendiri, pemeriksaannya santai, malah ada yang sambil menunggu giliran mereka berselfi," ucap sumber koran ini.

Kasipidsus Kejari Tabanan Fathur Rohman mengatakan, kesebelas saksi yang diperiksa itu; IGNA, I Nyoman Gede J, I Wayan My, I Wayan Mr, I Gst Made S, I Nyoman Gede S, I Wayan M, Ni Ketut M, Dewa A, I Wayan S, dan I Wayan P. "Mereka diperiksa sejak pukul 11.00 hingga 17.00 dan penyidik kami mengajukan sekitar 23 sampai 35 pertanyaan kepada para saksi tersebut," ucap Fathur.

Dijelaskan mereka yang diperiksa dua hari terakhir adalah para staf DKP. "Sehari sebelumnya, kami memeriksa 10 orang saksi, dan hari ini (kemarin, Red) kami

periksa 11 orang. Semuanya adalah staf DKP," bebarnya.

Yang menarik, pemeriksaan kali ini adalah pemeriksaan terakhir bagi staf. Selanjutnya pihak penyidik akan memanggil saksi yang memiliki peran dalam kasus ini. "Ini pemeriksaan staf terakhir, selanjutnya akan kami panggil para saksi yang memiliki peran seperti kasubag dan yang lainnya," jelas Fathur. Selanjutnya barulah pihak penyidik melakukan ekspos untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab dan menjadi tersangka dalam kasus ini. "Minggu depan kami periksa yang memiliki peran, setelah itu kami ekspos untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam kasus ini," jelas pejabat asal Bojonegoro itu. (gin/djo)

Edisi : Jumat, 17 April 2015

Hal : 25



## Radar Bali

### Diikuti Puluhan Sulinggih

LALU sebenarnya seperti apa agenda perjalanan suci ke India tersebut? Koran ini mencoba mengorek cerita agenda *tirta yatra* ke India ini dari Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Badung I Nyoman Sukada. Sukada mengakui jika *tirta yatra* ke India menggunakan dana hibah Pemkab Badung kepada PHDI

► Baca *Diikuti...* Hal 31

## Perjalanan Tujuh Hari Enam Malam

### ■ DIKUTI...

Sambungan dari hal 21

Kegiatan dimotori dan dikoordinasi Dinas Kebudayaan Badung. Kapan *tirta yatra* terakhir? "*Tirta yatra* terakhir tahun 2013 lalu. Tapi, saya tidak ikut rombongan waktu itu," urai pria paro baya ini.

Informasi yang didapat koran ini, *tirta yatra* tahun 2013 ini lah yang kabarnya sedang diincar kejaksaan. Nah, yang menarik peserta *tirta yatra* tahun 2013 ini diikuti para *sulinggih* dan *walaka*. Jika tidak salah, ungkap Sukada, rombongan terdiri dari 30 orang. Rinciannya 20 orang *sulinggih* dan 10 orang *walaka*. "Kalau *sulinggih* 20 orang, sedangkan *walaka* 10 orang. *Walaka* ini sifatnya *ngiring*," ceritanya.

Sukada sendiri pernah ikut rombongan *tirta yatra* ke India beberapa tahun silam. Namun, dia lupa tahun pasti keberangka-

tan. "Saya waktu itu ikut, dalam rombongan juga ada Pak Bupati (AA Gde AGung, Red). Tapi, tahunnya saya lupa tahun 2010 atau 2011," tutur Sukada mengingat-ingat.

Selama di India sejumlah tempat dikunjungi rombongan. Terutama tempat bersejarah dalam kesusastraan yang ada dalam agama Hindu. Seperti Sungai Gangga, daerah atau tempat kelahiran Krhisna, tanah lapang Kurusetra (tempat perang Mahabarata) hingga bangunan Tajmahal. Yang menarik, waktu yang digunakan selama *tirta yatra* ini cukup panjang, yakni selama satu pekan. "Kalau tidak salah waktu *tirta yatra* selama tujuh hari enam malam plus perjalanannya," paparnya.

Ditanya apakah *tirta yatra* ke India harus, Sukada mengatakan tidak wajib. Namun, *tirta yatra* ini menurutnya baik bagi para *sulinggih* yang berkecimpung dan mendalami ajaran agama Hindu. "*Sulinggih* ini

kan mengajar juga, jadi setidaknya pernah tahu tempat yang dia sebut dan diajarkan. Karena itu *tirta yatra* ke India yang merupakan tempat asal agama Hindu," jelas pria asal Mengwi ini.

Terkait adanya pemeriksaan dari kejaksaan mengenai dana perjalanan *tirta yatra*, Sukada mengaku tidak tahu. Namun demikian dia mengaku mendengar kasus yang sedang bergulir. "Saya sudah dengar berita itu, cuma saya *nggak* tahu jelasnya. Kalau tidak salah informasinya yang tahun 2013. Tapi, itu berita asalnya tidak bertuan," ucapnya dengan nada halus.

Tapi, dana hibah *tirta yatra* diperuntukkan PHDI Badung? Ditanya begitu, Sukada tidak menampik. Setelah didesak, dia malah menyebutkan semua urusan sudah selesai dan beres. Apanya yang sudah beres? "Ya, masalahnya itu sudah selesai dan sudah diluruskan. Sekarang sudah selesai," tukasnya. (san/yes)

Edisi : Jumat, 17 April 2015.

Hal : 21 dan 31



**HUKUM** ✓

### **Pramono Tegaskan Banding**

**GIANYAR** - Sepekan setelah putusan Pengadilan Tipikor Denpasar yang memvonis Ngakan Putu Tirta Pramono, 29, dengan pidana penjara selama 2 tahun, anggota DPRD Gianyar ini bersikap.

Buktinya, kemarin (16/4), kuasa hukumnya, Ngakan Kompyang Dirga menegaskan jika kliennya tersebut bakal mengajukan banding. Namun, dikatakan, hingga kemarin pihaknya belum menerima salinan putusan pengadilan terkait putusan tersebut.

"Kami tegaskan banding. Tapi sampai saat ini memori bandingnya memang belum ada," katanya sambil mengaku hingga kemarin, pihaknya belum menerima salinan putusan sebelumnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, sesuai rencana hari ini, pihaknya bakal mendatangi langsung pengadilan. Langkah ini dilakukan untuk meminta salinan putusan tersebut. Lantaran memori banding yang bakal mereka susun lebih dulu akan disesuaikan dengan pertimbangan hakim yang memutuskan sebelumnya.

"Jika tak ada halangan, besok (hari ini, Red) kami akan ke pengadilan untuk mengambil salinan putusannya. Karena kami juga perlu mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan sebelumnya, sebagai bagian penyusunan memori banding nanti," terangnya. Bahkan dia merencanakan, begitu salinan putusan tersebut pihaknya terima, saat itu pula timnya bakal menyusun memori banding yang diharapkan bisa selesai dalam waktu dua hari. (wid/dio)



# Siap Kucurkan Dana

## Rp 11,4 Miliar

**PERKEMBANGAN** lain terkait pendanaan, rapat koordinasi dan evaluasi persiapan anggaran pilkada untuk Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Jembrana akhirnya disepakati sebesar Rp 11,471 miliar. Sedangkan untuk anggaran pengawasan, hingga kemarin masih belum sepakat.

Pasalnya, anggaran Rp 1,5 miliar yang sebelumnya akan diperuntukkan bagi pengawasan pemilu itu masih mendapat penolakan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jembrana. Bawaslu Jembrana masih belum setuju dengan kecilnya besaran anggaran un-

tuk pengawasan pilkada.

Seperti terungkap dalam pertemuan KPUD, di rapat yang dipimpin Ketua KPUD Provinsi Bali Dewa Kade Wiarso Raka Sandi, dan dihadiri anggota KPUD Bali, ketua KPUD Jembrana IGNA Darma Sanjaya, Sekda Jembrana Gede Gunadnya, anggota Bawaslu Bali Ketut Sunadra dan sejumlah pejabat di Biro Keuangan Provinsi Bali dan para SKPD di Jembrana itu, Ketua KPUD Jembrana, IGNA Darma Sanjaya menjelaskan bahwa dari hasil kesepakatan bersama tersebut, khusus anggaran untuk KPUD Jembrana sebesar Rp 11,471 miliar.

Hanya saja, kata Darma Wijaya, dari

nilai anggaran yang disepakati, baru sebesar Rp 10,3 miliar yang sudah masuk dalam APBD Induk Jembrana 2015: "Sisa anggaran sebesar Rp 1,171 miliar yang belum masuk, nantinya akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2015," terangnya. Sedangkan, Ketua Panwaslu Jembrana, Pande Made Ady Muliawan, mengatakan, terkait anggaran sebesar Rp 1,5 miliar untuk pengawasan, pihaknya menilai masih sangat kecil. "Itu (anggaran) menggunakan pola anggota pilkada 2010. Tentu, jika acuannya

pilkada lalu, hal ini tidak sesuai dengan UU Pilkada yang baru," tegasnya.

Dikatakan Ady Muliawan, perbedaan antara pilkada 2015 dengan pilkada sebelumnya (2010) adalah pada jumlah pengawas di TPS. "Nanti tiap TPS ditempatkan seorang pengawas. Tentu hal ini yang tidak ada pada pilkada sebelumnya," tambahnya. Untuk itu, ia berharap masih ada pertimbangan. "Jangan sampai kami kehabisan peluru di tengah tahapan. Nanti pilkadanya tidak ada yang mengawasi. Pilkada ilegal kalau tidak ada pengawas," ujarnya. (pra/pit)

Edisi : Jumat, 17 April 2015.

Hal : 23



# Tim Kejari Cegat

# 4 Pejabat Badung

Mereka Dicegat Saat Hendak ke Besakih



1. Kadis Kebudayaan Badung IB Anom Basma



2. Kepala Inspektorat Badung Ni Luh Suryanti



3. Kabag Hukum Badung Komang Budi Argawa

4. Kabag Keuangan Badung Ketut Gede Suyasa

GRAFIS: DYAH FEDIAWATI/RADAR BALI

## Saat Hendak Berangkat ke Besakih

**DENPASAR** - Badung sebagai daerah terkaya, memang selama ini mampu membuat penegak hukum "jinak". Belakangan kasus - kasusnya mulai digeber. Bahkan, Kajari Denpasar Immanuel Zebua memerintahkan anak buahnya untuk "mengobrak-abrik" Pemkab Badung. Empat pejabat teras Badung diinterogasi di pemkab yang dipimpin AA Gede Agung itu.

Informasi yang dirangkum koran ini, Tim Kejari Denpasar sudah masuk ke Puspem Badung pukul 08.30. Tim dipimpin oleh Kasi Intel Kejari Denpasar Syahrir Sagir ■

► Baca Tim ... Hal 31

Edisi : Jumat, 17 April 2015

Hal : 21 dan 31



Sambungan

# Kadisbud Badung

## Ngaku Tak Tahu

■ TIM...

Sambungan dari hal 21

"Tim sudah ke Badung sejak pagi. Langsung ke puspem hendak mengambil data," ungkap sumber koran ini di Kejari Denpasar, kemarin (16/4).

Kasi Intel Kejari Denpasar Syahri Sagir ketika dikonfirmasi membenarkan pergerakan timnya. "Ya, benar. Kami baru saja kembali dari Badung. Kami sudah mendapatkan keterangan sementara dari empat pejabat," tegas Syahrir saat dikonfirmasi

melalui telepon dan dalam perjalanan pulang dari Badung.

Dia mengatakan, sampai di Puspem Badung memang para pejabat sudah memakai pakaian adat dan bersiap akan berangkat ke Pura Besakih. Namun, lantaran tim Kejari Denpasar datang, akhirnya empat pejabat mengundurkan waktu keberangkatannya. Mereka diminta memberikan penjelasan oleh tim kejari.

Empat pejabat itu adalah Kadis Kebudayaan IB Anom Basma, Kepala Inspektorat Ni Luh Sury-

anti, Kabag Hukum Komang Budi Argawa, dan Kabag Keuangan Ketut Gede Suyasa.

"Empat pejabat kami mintai keterangan dalam kondisi mengenakan pakaian adat," ungkap Syahrir. Syahrir langsung memburu penjelasan terkait dana *tirta yatra* ke India. Dia mengatakan atas laporan masyarakat ada penyimpangan. "Kami tanyakan terkait kasus dugaan korupsi dana *tirta yatra* ke India," ungkapnya.

Kemudian diberikan beberapa data terkait dengan dana ke

India. Syahrir juga mengatakan, dari penjelasan para pejabat ini, ternyata kasus *tirta yatra* ke India ini sempat diendus oleh KPK. Ada program Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah) KPK yang dipimpin oleh pimpinan Zulkarnaen, melakukan audit terhadap program secara acak. Hasilnya, ternyata dana *tirta yatra* ke India yang muncul. "KPK sempat melakukan penelusuran atas program ini tahun 2014 dan BPKP juga sempat melakukan audit. Hasilnya kami masih bawa data-datanya," ungkapnya.

Berapa kardus datanya? "Nggak sampai satu kardus. Ini baru beberapa bendel kami ambil. Lantaran para pejabat ini akan segera ke Besakih, nanti kami lanjutkan lagi," jawabnya.

Seperti berita sebelumnya, ada beberapa kasus yang muncul di Badung. Kasus *tirta yatra* ke Gunung Salak di Inspektorat. Kemudian menyusul lagi kasus *tirta yatra* ke India. Dengan nilai sekitar Rp 900 juta lebih.

Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) Badung IB Anom Basma dikonfirmasi beralasan

tidak tahu kedatangan petugas dari kejari. "Saya tidak tahu karena saya sedang di Pura Besakih *nganyarin*," katanya singkat. Ada petugas dari kejaksaan yang datang memeriksa? "Saya belum tahu, nanti saya coba cek lagi," ujarnya singkat. Namun, sebelumnya Basma sempat menyebut masalah ini sudah klar.

Sementara itu, Bupati Badung AA Gde Agung yang dikonfirmasi juga tidak banyak memberikan penjelasan. Senada dengan Basma, bupati

mengaku sedang berada di Pura Besakih, Karangasem. "Saya masih di Besakih upacara *nganyarin*, saya tidak tahu," katanya. Koran ini mendesak sikap Gde Agung sebagai kepala daerah terkait kasus ini, dia memberikan jawaban normatif. Dia menyebut jika dirinya selalu menghormati proses dan keputusan hukum. "Kan tahu sendiri, dari dulu saya paling taat hukum dan aturan. Saya mengikuti dan menghormati hukum," pungkas bupati dua periode ini. (art/san/yes)

Hal. 2

Edisi : Jumat, 17 April 2015

Hal : 21 dan 31